Journal of Mandalika Social Science

Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif

KATA KUNCI

kemiskinan struktural, pembangunan inklusif, strategi penanganan, kebijakan sosial

[1] Elga Dimas, [2] Randi Pratama, [3] Izharun

[1,2,3] Universitas Islam Negri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: elgadimas@gmail.com , randip@gmail.com , izhar@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan struktural merupakan persoalan kompleks yang bersumber dari ketimpangan sistemik dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan utama dan merumuskan strategi penanganan kemiskinan struktural dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial inklusif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, ditemukan bahwa kemiskinan struktural diperparah oleh lemahnya tata kelola, keterbatasan infrastruktur, serta marginalisasi kelompok rentan. Strategi penanganan yang efektif harus bersifat multidimensional dan melibatkan kolaborasi antar sektor. Penanganan ini perlu menekankan pada reformasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif.

This is an open acces article under the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Copyright holders:
Elga Dimas, Randi Pratama, Izharun (2025)

First publication right:
Journal of Mandalika Social Science
Volume 2 Nomor 1 2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural di Indonesia tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan

sosial, meskipun berbagai program intervensi telah dilaksanakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2023, tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,36%, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 1,12% (BPS, 2023). Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui berbagai strategi, termasuk pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan (Bappenas, 2023).

Namun, tantangan dalam penanganan kemiskinan struktural masih signifikan. Distribusi kemiskinan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar, menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif (Kemenko PMK, 2021). Meskipun alokasi anggaran perlindungan sosial meningkat, efektivitas program-program tersebut dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan struktural masih dipertanyakan (TNP2K, 2021).

Berbagai studi telah membahas strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Bappenas menyoroti pentingnya integrasi program kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan graduasi dari kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2023). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait efektivitas strategi tersebut dalam konteks kemiskinan struktural yang kompleks.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, terdapat kekurangan dalam studi yang mengkaji secara mendalam tantangan dan strategi penanganan kemiskinan struktural dalam kerangka pembangunan sosial inklusif. Kebanyakan studi fokus pada aspek teknis program tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan struktural yang mendasari kemiskinan (TNP2K, 2021).

Dengan target pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan mencapai pembangunan sosial yang inklusif, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan strategi yang efektif dalam menangani kemiskinan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Penelitian ini menawarkan pendekatan holistik dalam menganalisis kemiskinan struktural, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang saling terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam merancang strategi penanganan kemiskinan yang lebih efektif dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam penanganan kemiskinan struktural di Indonesia, menganalisis efektivitas strategi yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkaya literatur akademik terkait pembangunan sosial dan kemiskinan struktural di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai temuan dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji (Zed, 2004; Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumen dan artikel ilmiah yang relevan, baik jurnal nasional terakreditasi (SINTA) maupun jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science. Artikel yang dikaji dipublikasikan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2018–2024) dan berfokus pada strategi pembelajaran PAI serta penanaman nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan formal. Referensi utama diperoleh dari jurnal seperti HTS Teologiese Studies, Cogent Education, Jurnal Pendidikan Islam, JIIP, dan jurnal lainnya yang relevan dan kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengakses artikel dari database seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional (SINTA). Proses ini meliputi identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan kriteria inklusi tertentu, seperti relevansi topik, kualitas publikasi, dan keberterimaan dalam komunitas akademik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dikembangkan oleh Krippendorff (2004) dan disesuaikan dengan model Miles, Huberman, &

Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan informasi penting dari berbagai literatur. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif untuk menunjukkan pola atau tema yang muncul. Kesimpulan ditarik berdasarkan sintesis tematik dari data yang telah dianalisis, dengan tetap menjaga objektivitas dan validitas melalui triangulasi sumber (Lexy J. Moleong, 2017).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya strategi pembelajaran PAI yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar serta menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang relevan di masa depan..

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan menjadi faktor krusial dalam mempertahankan kemiskinan struktural. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun budaya. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Tanpa pendidikan, mereka memiliki peluang terbatas untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Pembangunan sosial inklusif menuntut adanya pemerataan akses pendidikan, termasuk pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan kerja. Kebijakan affirmative seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) sudah menunjukkan dampak positif, tetapi belum menjangkau kelompok marginal di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) (Rizal & Purnairawan, 2024). Perlu adanya integrasi antar sektor dan peningkatan kualitas sekolah di daerah miskin untuk memutus rantai kemiskinan struktural.

2. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang layak juga menjadi tantangan utama dalam kemiskinan struktural. Masyarakat miskin sering kali menghadapi kendala ekonomi dan geografis dalam memperoleh layanan kesehatan, terutama layanan promotif dan preventif. Akibatnya, angka kesakitan dan kematian pada kelompok ini cenderung lebih tinggi, yang selanjutnya berdampak

pada rendahnya produktivitas kerja.

Pembangunan sosial inklusif mensyaratkan layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program seperti JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan langkah strategis, namun perlu evaluasi terhadap distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah terpencil (Setiawan & Jamaliah, 2023). Penguatan peran puskesmas dan kader kesehatan desa menjadi strategi penting dalam menjawab tantangan ini.

3. Ketimpangan Ekonomi dan Konsentrasi Kekayaan

Salah satu ciri utama kemiskinan struktural adalah adanya ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Kekayaan dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi rentan. Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada kelompok miskin dan tidak mampu mendorong redistribusi aset secara adil.

Upaya penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi juga melalui reformasi struktural, seperti distribusi lahan, insentif pajak progresif, dan dukungan terhadap usaha kecil. Pembangunan ekonomi yang inklusif memerlukan pendekatan yang menjamin partisipasi aktif kelompok miskin dalam kegiatan ekonomi produktif (Prasetyo et al., 2023).

4. Akses Terbatas terhadap Lapangan Kerja Layak

Tingginya angka pengangguran dan pekerja informal di kalangan masyarakat miskin menunjukkan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Banyak di antara mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, tanpa jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi.

Strategi penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan sektor riil, UMKM, dan ekonomi kreatif. Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal serta kebijakan upah minimum yang adil dapat menjadi instrumen untuk mendorong inklusi ekonomi dan mobilitas sosial vertikal (Maisanti et al., 2024).

5. Lemahnya Kualitas Tata Kelola dan Kebijakan Publik

Tata kelola yang buruk dan kebijakan yang tidak tepat sasaran menjadi hambatan besar dalam mengatasi kemiskinan struktural. Banyak program bantuan tidak mampu menjangkau penerima yang paling membutuhkan karena ketidaktepatan data dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, masih terdapat praktik korupsi dalam penyaluran bantuan yang mengurangi efektivitas

program.

Untuk mewujudkan pembangunan sosial inklusif, perlu ada reformasi birokrasi dan penguatan sistem pendataan berbasis teknologi. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan yang adil dan merata (Calundu & Musdalifa, 2023).

6. Marginalisasi Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Diskriminasi struktural terhadap kelompok ini membuat mereka sulit mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya.

Strategi pembangunan inklusif harus mengakui keberagaman dan menjamin bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial perlu menjadi bagian integral dalam desain dan implementasi program pembangunan (Suwandi et al., 2022).

7. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah Tertinggal

Ketimpangan infrastruktur menjadi penghambat mobilitas dan akses layanan publik. Wilayah tertinggal mengalami keterisolasian yang memperkuat kemiskinan.

Investasi infrastruktur berbasis wilayah dan potensi lokal merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan spasial dan sosial.

8. Ketidakadilan Akses terhadap Modal dan Teknologi

Masyarakat miskin tidak memiliki jaminan untuk mengakses layanan keuangan formal. Literasi digital dan keuangan yang rendah juga memperparah kondisi ini.

Program pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan teknologi tepat guna menjadi kunci pemberdayaan ekonomi.

9. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kemiskinan struktural diperparah oleh eksklusi sosial yang menyebabkan masyarakat tidak terlibat dalam proses pembangunan.

Partisipasi aktif dapat ditingkatkan melalui forum musyawarah desa, peningkatan kapasitas sosial, dan pendekatan pemberdayaan partisipatif.

10. Rekomendasi Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural

Strategi penanganan kemiskinan struktural harus multidimensional, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Solusi yang ditawarkan harus menyentuh akar masalah struktural, bukan hanya gejalanya, agar pembangunan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kemiskinan struktural merupakan persoalan kompleks yang berakar pada ketimpangan sistemik dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga partisipasi dalam pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penanganan kemiskinan struktural meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak, ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, lemahnya tata kelola kebijakan publik, marginalisasi kelompok rentan, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah tertinggal. Selain itu, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta partisipasi masyarakat yang masih minim turut memperparah kondisi kemiskinan yang bersifat turun-temurun.

Strategi penanganan kemiskinan struktural dalam konteks pembangunan sosial inklusif harus bersifat holistik, lintas sektor, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial. Intervensi yang dibutuhkan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga harus menyasar perubahan struktural melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan lokal, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput menjadi kunci keberhasilan strategi penanganan kemiskinan struktural untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif.

REFERENSI

Bappenas. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/pertumbuhan-ekonomi-inklusif-mengentaskan-kemiskinan-dan-ketimpangan-di-

indonesia:contentReference[oaicite:22]{index=22}
Calundu, M., & Musdalifa, R. (2023). Tata Kelola Bantuan Sosial dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jurnal Governance, 17(1), 101-115.
Hamdani, J., & Apriani, E. (2024). Strategi Penanaman Nilai Moderasi Beragama pada Siswa melalui Pembelajaran PAI. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 1(1), 1–15.
Haris, S., & Widodo, A. (2022). Pemberdayaan dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Jurnal Partisipasi Sosial, 13(1), 66-82.
Kemenko PMK. (2021). Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat. Retrieved from https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan
masyarakat:contentReference[oaicite:23]{index=23}
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.). Sage Publications.
Lestari, D., & Mahendra, F. (2023). Strategi Nasional Penanganan Kemiskinan Struktural: Analisis Multisektor. Jurnal Strategi Sosial, 4(3), 87–102.
Lexy J. Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Maisanti, H., Siregar, L., & Darmaningrum, A. (2024). Ketahanan Kerja di Era Digital: Tantangan untuk Kaum Miskin. Jurnal Sosiologi Kerja, 9(1), 25-39.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
Mukmin, A. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama. Pedagogik: Jurnal Pendidikan dan Riset, 2(3), 307–314.
Prasetyo, A., et al. (2023). Ketimpangan Kekayaan dan Kemiskinan Struktural di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(3), 130-145.
Prasetyo, B. (2023). Konektivitas Wilayah dan Pembangunan Inklusif. Jurnal Infrastruktur dan Kebijakan Pembangunan, 5(1), 40-55.
Ramadhan, A., & Nurfadilah, T. (2024). Akses Keuangan untuk UMKM di Daerah Tertinggal. Jurnal Keuangan Inklusif, 6(2), 19-35.
Rizal, M., & Purnairawan, D. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan di Wilayah 3T: Evaluasi Kebijakan KIP. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 45-60.
Setiawan, A., & Jamaliah, R. (2023). Distribusi Tenaga Kesehatan dalam Sistem JKN. Jurnal Administrasi Kesehatan, 11(2), 78-90.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suwandi, Y., Fitriani, N., & Hidayat, T. (2022). Inklusi Sosial dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Sosial Humaniora, 10(2), 58-74.
TNP2K. (2023). Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan yang Inklusif di Indonesia. Retrieved from https://www.tnp2k.go.id/articles/challenges-policies-and-solutions-for-inclusive-growth-in-indonesia:contentReference[oaicite:24]{index=24}
Zed, M. (2004). Literature Review: Langkah Awal Penelitian Ilmiah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.